



BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari dilakukannya penelitian ini. Otonomi daerah memungkinkan setiap daerah untuk mengatur keuangan daerahnya secara mandiri. Sehingga setiap daerah akan berusaha memaksimalkan pendapatan asli dari daerah mereka masing – masing. Salah satunya berasal dari pemungutan pajak daerah. Penelitian ini juga berusaha untuk mengetahui menganalisis peranan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak restoran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bekasi periode 2011 – 2013. Penulis memilih kedua jenis pajak tersebut karena kedua pajak tersebut merupakan komponen pajak terbesar dalam penerimaan pajak daerah Kota Bekasi. Hal ini dapat dilihat pada Lampiran VII, VIII, dan IX.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar, dimana sampai sekarang potensi yang ada saat ini masih terus digali. Pemungutan pajak sangat diperlukan dalam penyelenggaraan suatu negara hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang dapat dicapai dengan pembangunan di segala bidang. Pajak kini menjadi bagian yang sangat penting bagi kelangsungan Negara Indonesia, dikarenakan pajak telah memberikan kontribusi terbesar untuk pemasukan Negara. Hal tersebut dapat kita lihat dari Tabel berikut :



Tabel 1.1

Anggaran Pendapatan Belanja Negara Periode 2010 – 2013

(dalam milyar rupiah)

Rincian	2010	2011	2012	2013
Penerimaan Dalam Negeri	948,149	1,101,162	1,310,562	1,525,189
Penerimaan pajak	742,738	850,255	1,032,570	1,192,994
Pajak dalam negeri	715,535	827,246	989,637	1,134,289
Pajak Perdagangan Internasional	27,203	23,009	42,933	58,705
Penerimaan bukan pajak	205,411	250,907	277,992	332,195
Penerimaan SDA	132,030	163,119	177,264	197,205
Bagian laba BUMN	24,000	27,590	28,001	33,500
Penerimaan bukan pajak	39,894	45,167	53,492	77,991
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	9,487	15,031	19,235	23,499
Hibah	1,507	3,740	825	4,484

Sumber: www.bps.go.id (diolah kembali tahun 2015)

Setiap daerah di Indonesia memperoleh hak untuk mengelola daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan pembangunan daerah. Pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan kota menyebabkan peran pemerintah pusat semakin kecil, sebaliknya pemerintah daerah akan semakin besar dalam pembangunan. Pemberlakuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah di Negara Indonesia.

Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



daerahnya atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan – tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan cita – cita masyarakat yang lebih baik dan makmur.

Keuangan daerah menjadi sangat penting dan strategis dalam menentukan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu, kepala daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang ada salah satunya adalah dari pajak daerah. Paradigma baru penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan tujuan memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk bisa mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya agar lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah serta meminimalkan ketergantungan Daerah Kota dan Kabupaten pada Pemerintah Provinsi, maka daerah diberi salah satu kewenangan yaitu di bidang keuangan. Pentingnya posisi keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan disebabkan bahwa faktor keuangan merupakan salah satu penentu keberhasilan realisasi otonomi daerah. Kemandirian dalam bidang keuangan merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan nyata daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya. Salah satu cara dalam merealisasikan kemandirian keuangan daerah adalah dengan berusaha mencari sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah dan potensi daerah sendiri.

Bekasi merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program – program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut dibutuhkan ketersedianya dana yang cukup besar dalam rangka melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan yang sebagian besar harus dibiayai dengan kekuatan daerahnya sendiri, disamping bantuan dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah kota Bekasi berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis – jenis pendapatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Bekasi melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan perda tentang pajak dan retribusi daerah, mengupayakan dan meningkatkan sumber – sumber penerimaan daerah khususnya Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi menjadi Pajak Daerah.

Kota Bekasi merupakan kota niaga dan jasa yang perkembangan usaha dan bisnisnya cukup pesat, terdapat berbagai macam industri yang sangat penting dalam pemasukan daerah Kota Bekasi. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa bangunan pabrik atau gedung perkantoran atau rumah toko banyak diperlukan untuk kegiatan operasional perusahaan. Sehingga membuat banyaknya transaksi jual-beli terhadap tanah dan bangunan yang akan menaikkan potensi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Potensi pendapatan daerah yang lain juga terdapat pada pajak restoran. Dengan terdapat banyaknya perusahaan yang berlokasi di Kota Bekasi menyebabkan kebutuhan akan jasa tata boga akan bertambah. Hal ini juga akan menambah pemasukan daerah dari pajak restoran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “ **ANALISIS PERANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PAJAK RESTORAN DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BEKASI PERIODE 2011 – 2013** ”



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah – masalah diatas dapat

identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penerimaan apa saja yang mempengaruhi pendapatan asli daerah kota Bekasi?
2. Bagaimana perkembangan pendapatan asli daerah Kota Bekasi?
3. Bagaimana perkembangan pertumbuhan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bekasi?
4. Bagaimana perkembangan pertumbuhan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bekasi?
5. Apakah realisasi pendapatan asli daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak restoran telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan?

C. Batasan Masalah

Mengingat begitu luasnya objek penelitian yang akan diteliti, maka penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Bagaimana perkembangan pendapatan asli daerah di Kota Bekasi tahun 2011 – 2013?
2. Bagaimana perkembangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Bekasi tahun 2011 – 2013?
3. Bagaimana perkembangan pajak restoran di Kota Bekasi tahun 2011 – 2013?



4. Apakah realisasi pendapatan asli daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak restoran telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan?



Hak Cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

D. Batasan Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang terfokus dan mencapai tujuan dari penelitian ini, maka ditetapkan batasan penelitian ini, obyek yang diamati adalah data anggaran dan realisasi pada penerimaan pendapatan asli daerah dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak restoran di wilayah Kota Bekasi. Penelitian ini akan memfokuskan pada penggunaan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi berupa laporan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: “Bagaimana perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) dan perkembangan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak restoran di Kota Bekasi tahun 2011 – 2013, berapa besarnya peranan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, apakah realisasi pendapatan telah sesuai dengan anggaran, serta apakah anggaran pajaknya telah sesuai dengan potensi yang ada?”

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Bekasi tahun 2011 – 2013.
2. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kota Bekasi tahun 2011 – 2013.
3. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan pajak restoran Kota Bekasi tahun 2011 – 2013.
4. Untuk mengetahui adakah realisasi pendapatan daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak restoran telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan menjadi bahan masukan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bekasi dalam melakukan penyempurnaan pengelolaan pajak daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan penerimaan Kota Bekasi.



2. Bagi Peneliti

Memperoleh kesempatan untuk melakukan analisa terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bekasi, serta pembelajaran dalam pembuatan karya tulis yang baik dan benar secara terstruktur.

Bagi Pembaca

Memberikan informasi dan gambaran yang baik mengenai pengaruh bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.